



PELUANG, TANTANGAN DAN HAMBATAN EKSPOR MELALUI PELABUHAN KRUENG GEUKUEH

Khairil Anwar

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Email: khairilanwar@fe-unimal.org

Abstract

This survey aims to analyze the opportunities, constraints and challenges of commodity exports through the Port of Aceh Province Krueng Geukueh Aceh Utara. The survey was conducted for 37 calendar days, starting from November 17 until December 24, 2010 with the number of respondents as many as 36 people, consisting of: local government, banking, exporters, ports, and KADINDA to four regencies/cities, namely Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah and Kota Lhokseumawe. The survey found Aceh commodity exports are still dominated by primary sector (agriculture, plantation, and fishery). The leading commodities are: palm oil, coffee, cocoa and copra, areca nut, cinnamon and resin. Countries that export destination countries include ASEAN, Japan, South Korea, India, America and some European countries. Opportunities opening of exports through the Port of Krueng Geukueh Aceh Utara at the moment is quite large, because of the strong commitment from local governments, exporters, business associations (Kadin), from banks, and from PT Pelabuhan Indonesia I Lhokseumawe Branch. However, in realizing the plan of opening of exports through the port of Krueng Geukueh Aceh Utara will also face obstacles stemming from the challenges into opportunities must be maximized.

Key words: Opportunity, constraint, and challenge

Pendahuluan

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan (*sustainable*) merupakan dambaan setiap negara maupun daerah. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berarti peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada umumnya atau dengan kata lain telah terjadinya perubahan pada kondisi taraf hidup masyarakat. Hal tersebut sangatlah relevan dengan dasar teori yang menyatakan bahwa "Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan".

Ekspor yang merupakan salah satu unsur penting dalam permintaan agregat nasional juga mulai menunjukkan kemajuan. Berdasarkan data dari IFS tahun 2007 ekspor Indonesia telah mencapai US \$ 140.478 juta. Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2006 yang hanya US \$ 95.306 juta. Meningkatnya ekspor akan berimplikasi positif bagi peningkatan cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan kinerja ekspor juga dialami komoditas provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama periode pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kenaikan angka ekspor ini sangat menggembirakan. Beberapa hal yang dapat diungkapkan dari fenomena ini antara lain adalah : *Pertama*, ini menunjukkan mulai terbukanya kembali peluang bagi pemasaran komoditas daerah ini di pasaran luar negeri pasca krisis ekonomi. *Kedua*, memberikan motivasi bagi pelaku ekonomi di daerah ini untuk memanfaatkan potensi yang ada, khususnya di sektor-sektor ekonomi unggulan seperti perikanan, perkebunan, industri pengolahan/industri kecil, dan beberapa lainnya. *Terakhir*, kemungkinan adanya perubahan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas/instansi teknis dan terkait sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan nilai ekspor yang begitu signifikan. Atau bisa jadi, kenaikan nilai ekspor Aceh terjadi tanpa intervensi atau campur tangan dari para pengambil kebijakan, melainkan terjadi dengan sendirinya.

Di provinsi Aceh terdapat 3 (tiga) pelabuhan yang dapat berperan dalam laju tumbuhnya kegiatan ekspor-impor hasil bumi/kekayaan alam yaitu: Pelabuhan Malahayati, Meulaboh dan Kreung Geukeuh. Menurut Harian Serambi tanggal 21 Oktober 2009 peranan ketiga pelabuhan ke depan sebagai berikut:

- Pelabuhan Malahayati (Kabupaten Aceh Besar) difokuskan menjadi Pelabuhan Peti Kemas.
- Pelabuhan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) difokuskan menjadi Pelabuhan Pengangkutan Crude Palm Oil (CPO).
- Pelabuhan Kreung Geukeuh (Kabupaten Aceh Utara) difokuskan menjadi Terminal Terpadu (Pusat Logistik & bahan-bahan kebutuhan di Aceh, terminal penumpang industri migas & pusat distribusi industri).

Bila melihat fakta besarnya kekayaan alam yang dimiliki Aceh Utara dan Aceh Tengah serta rencana optimisasi Pelabuhan Kreung Geukeuh menjadi Pelabuhan Internasional, tentu dapat diprediksikan dan diproyeksikan bahwa semua komoditi unggulan mendapat peluang besar untuk ekspor melalui Pelabuhan Kreung Geukeuh Aceh Utara. Namun kenyataan yang terjadi selama ini bahwa semua komoditi unggulan Aceh Utara dan daerah sekitar diekspor melalui Pelabuhan Belawan-Sumut.

Kenaikan nilai ekspor Provinsi Aceh ini patut mendapat apresiasi tersendiri dari semua kalangan, mengingat daerah ini dulunya terjadi konflik politik yang berkepanjangan antara Pemerintah RI dengan GAM yang dapat berdampak pada ketidakstabilan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah. Pasca konflik dan penandatanganan MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005, banyak pihak yang berharap kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin membaik, sehingga didasari upaya-upaya untuk mencapai harapan tersebut berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan rencana ekspor komoditas unggulan Aceh melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara.

Selama ini ekspor dan impor provinsi Aceh masih melalui Pelabuhan Belawan provinsi Sumatera Utara. Ditinjau dari aspek ekonomi, ekspor melalui Pelabuhan Belawan akan merugikan Aceh terutama menyangkut biaya-biaya yang harus dikeluarkan eksportir seperti biaya angkut komoditi ke Medan, biaya penyimpanan, biaya bongkar muat, dan biaya-biaya lainnya. Selain itu, nilai kerugian ekonomis juga terjadi karena pengeluaran biaya-biaya keluar dari Aceh. Sementara bila diekspor langsung dari Pelabuhan Krueng Geukueh, maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh eksportir akan tetap bergulir di Aceh dan dinikmati oleh masyarakat Aceh.

Ditinjau dari kesiapan pelabuhan sebenarnya tidak bermasalah, semua fasilitas yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe sudah cukup representatif seperti; gudang, *forklift*, *crane* dan sebagainya, ditambah lagi dengan kesiapan pengoperasian KM Marisa (Kapal Motor milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) yang mempunyai daya angkut mencapai 1.000 ton. Selibuhnya diperlukan langkah strategis untuk mensosialisasikan dan meyakinkan investor dan eksportir melakukan kegiatan bisnisnya melalui pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara.

Rencana ekspor langsung dari Aceh ke negara-negara mitra dagang, terutama Malaysia bukanlah sesuatu yang baru. Pada tahun 2006 telah dirintis perdagangan langsung Malaysia dengan mendirikan Aceh World Trade Center (AWTC) bekerjasama dengan Angkutan Sungai dan Pelabuhan (ASDP) Malaysia, hasilnya pada 26 Januari 2006 pelayaran pertama dari Pelabuhan Krueng Geukueh dengan tujuan Malaysia dapat dilaksanakan. Namun belakangan banyak hambatan yang dihadapi dalam kelanjutan operasional terutama rendahnya komitmen dan partisipasi dari berbagai elemen sehingga akhirnya jalur ini akhirnya ditutup. Dari pengalaman ini diperlukan suatu kajian yang mendalam atas hambatan-hambatan dalam perdagangan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh dan mencari suatu solusi komprehensif agar pelabuhan ini dapat dioperasikan kembali.

Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini yang memerlukan kajian atau analisis adalah bentuk kebijakan dan program-program strategis apa yang telah diupayakan, khususnya oleh dinas/instansi teknis dan terkait di dalam hal mendorong pengembangan komoditas unggulan ekspor di Provinsi Aceh. Seandainya pun tidak ditemui suatu bentuk kebijakan atau program-program strategis yang ditempuh, maka kajian yang mampu menghasilkan suatu formulasi rencana yang benar-benar strategis sangatlah dibutuhkan guna mendorong perkembangan komoditas ekspor unggulan provinsi ini pada masa yang akan datang. Tentunya, pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap kondisi yang ada (*existing condition*) dari komoditas unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh selama ini sangatlah bermanfaat, sebelum langkah-langkah formulasi rencana strategis dilakukan.

Peluang Ekspor Melalui Pelabuhan Krueng Geukueh

Suatu perencanaan kegiatan selalu akan memunculkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif akan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dicapai, sedangkan dampak negatif akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara telah menyusun suatu perencanaan pembukaan Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara sebagai pelabuhan ekspor-impor. Rencana ini tentu saja memerlukan dukungan dari semua pihak. Apabila rencana ini berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, maka akan menjadi dorongan yang kuat dalam pembangunan ekonomi daerah. Selama ini ekspor komoditi daerah dilaksanakan melalui Pelabuhan Belawan Medan. Padahal, dari kegiatan ekspor-impor memberikan oportunitas yang sangat tinggi bagi kemajuan ekonomi daerah.

Beberapa peluang dari pembukaan jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara dapat diidentifikasi; 1) Fasilitas pelabuhan yang tersedia berstandar internasional; 2) Komoditi unggulan (terutama *raw material*) yang dihasilkan daerah mempunyai kualitas yang cukup baik dan memenuhi standar pasar internasional; 3) terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat daerah; 4) mempermudah akses dunia internasional bagi masyarakat Aceh; 5) menghemat biaya bagi perusahaan eksportir terutama biaya transportasi; 6) memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah dan masyarakat, dan peluang-peluang lain yang dapat dicapai daerah dengan dukungan dari berbagai pihak.

Dukungan Pemerintah Daerah

Rencana pembukaan Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara yang semula digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara mendapat respon yang positif dan dukungan dari Pemerintah Daerah Aceh maupun juga dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya terutama yang mempunyai akses lebih dekat dengan Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara. Wawancara dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Masing-masing kabupaten/kota diwakili oleh unsur Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Ketua Bappeda, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dari hasil studi secara umum pemerintah daerah menilai kondisi ekonomi pasca konflik sudah lebih baik. Kondisi ini selain dapat dilihat dari semakin berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, peran pemerintah daerah dalam menstabilkan kondisi ekonomi dirasakan sudah cukup maksimal. Pemerintah daerah juga menilai komoditi yang dihasilkan sektor riil cukup bervariasi dan potensial. Dengan semakin kondusifnya kondisi keamanan lapangan kerja semakin terbuka terutama pada sektor informal, upaya-upaya untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian semakin terbuka termasuk dengan membuka lahan-lahan pertanian yang selama konflik tidak produktif.

Masing-masing kabupaten/kota mempunyai komoditi unggulan yang berbasis ekspor berbeda-beda. Di Kabupaten Aceh Utara basis komoditi unggulan masih berkisar pada sektor pertanian dengan produk; kelapa sawit, kakao, pinang, dan karet. Sementara di Kota Lhokseumawe komoditi yang dihasilkan dari sektor perikanan dan konveksi. Komoditi unggulan di Kabupaten Bireuen adalah; pinang, karet, kelapa sawit, dan kakao. Sementara di Kabupaten Aceh Tengah komoditi yang paling diunggulkan yang selama ini diekspor adalah kopi, selain juga didukung dengan komoditi dari sektor pertanian lainnya.

Pemerintah daerah menilai peluang ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara untuk komoditi-komoditi unggulan dari daerah sangat besar untuk dilaksanakan, selama adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekspor impor ini termasuk dukungan dari masyarakat di sekitar pelabuhan. Namun demikian sekitar 15,76% pemerintah daerah meragukan kesiapan infrastruktur pelabuhan dan juga sarana dan prasarana pendukung masih dirasa minim. Sekitar 82,61% pemerintah daerah merasa yakin apabila ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh akan memberi dampak yang signifikan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD), sementara sisanya sebanyak 17,9% menyatakan walaupun dampak dari ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh akan meningkatkan PAD akan tetapi tidak akan signifikan. Pembukaan jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh juga diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Aceh.

Dukungan Perbankan

Secara umum perbankan di daerah memberikan apresiasi dan dukungan terhadap rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara membuka pelabuhan Krueng Geukueh sebagai pelabuhan ekspor-impor. Dari empat bank yang diobservasi menunjukkan adanya intensitas yang berbeda dalam hal kondisi sangat ini terutama menyangkut dengan intensitas transaksi keuangan maupun dalam penyaluran kredit.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lhokseumawe menunjukkan intensitas transaksi keuangan terus mengalami peningkatan yang disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang terus membaiknya kondisi ekonomi

masyarakat. Demikian juga halnya dengan intensitas permintaan kredit yang terus mengalami peningkatan yang disebabkan adanya peningkatan animo masyarakat untuk berwirausaha dan juga meningkatkan status sosial. Namun demikian pada PT BRI sendiri permintaan kredit produktif cenderung normal, hal ini mengindikasikan bahwa kredit-kredit yang diminta oleh masyarakat lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif.

PT BRI sangat mendukung rencana pemerintah daerah untuk melakukan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, karena dengan adanya pelabuhan di Aceh Utara bisa menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu secara tidak langsung juga akan meningkatkan volume permintaan kredit di Aceh. PT BRI melihat peluang ekspor komoditi unggulan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh sangat berpeluang untuk dilaksanakan sekarang, sepanjang perizinan dari Pemda Aceh dan Pemda Aceh Utara tidak berbelit-belit. PT BRI sangat siap dalam mendukung rencana ekspor ini, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan bank (bank teknis). Bahkan PT BRI Cabang Lhokseumawe juga siap untuk mengeluarkan *Letter of Credit* (LC) untuk mempermudah transaksi perdagangan internasional, dengan menyiapkan sumberdaya manusia yang menangani LC. Hanya saja menurut pihak BRI bagi para pelaku ekspor akan diperlakukan ketentuan yang sama dengan pemohon kredit umum lainnya, walaupun tetap dilihat transaksi bisnisnya. Sementara dalam menilai kelayakan Pelabuhan Krueng Geukueh melayani transaksi ekspor impor, PT BRI menilai layak karena sudah pernah dilaksanakan sebelumnya dan juga komoditi unggulan ekspor dari daerah juga tersedia.

Kondisi dan persepsi yang hampir sama dengan PT BRI, juga dialami oleh PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe. Dari segi intensitas transaksi keuangan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama transaksi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara intensitas permintaan kredit sangat tinggi terutama untuk modal usaha dagang dan pembiayaan proyek, Bank BPD Aceh menilai kondisi ini sebagai indikasi semakin kondusifnya kondisi ekonomi daerah. Intensitas permintaan kredit yang tinggi juga termasuk untuk kredit produktif.

PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe mendukung rencana pemerintah daerah melaksanakan ekspor impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh walaupun pihak BPD menilai bahwa dalam membahas tentang ekspor bukan hanya menyangkut masalah pelabuhan, akan tetapi juga ketersediaan dan kontinuitas komoditi yang akan diekspor, juga diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Dalam hal peluang, PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe menilai ekspor komoditi unggulan berpeluang dilakukan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh dengan catatan ketersediaan komoditi ekspor harus dalam jumlah yang besar serta konsisten dari segi mutu dan ketersediaanya.

Sebagaimana bank lainnya, PT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe merasa sangat siap untuk mendukung kegiatan ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh, dukungan berkaitan dengan kelancaran pembayaran secara cepat dan memudahkan bagi pelaku usaha. Mengenai kesiapan Bank BPD Aceh mengeluarkan LC, PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk saat ini belum mengeluarkan LC karena masih dalam proses menjadi bank devisa. Dalam hal pengurusan kredit oleh eksportir Bank BPD Aceh lebih bersifat fleksibel dengan tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dalam hal kelayakan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe mempunyai catatan bahwa dalam melakukan ekspor impor berkaitan dengan kesiapan barang/komoditi yang akan diekspor dalam hal jumlah dan mutu komoditi karena ekspor komoditi ke negara lain harus menyesuaikan dengan standar

internasional, infrastruktur menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi terutama kesiapan pelabuhan, jalan, listrik, dan transportasi.

Selanjutnya pada Bank PT BNI (Persero) Tbk Cabang Lhokseumawe intensitas transaksi keuangan mengalami penurunan. Menurut pihak Bank BNI penurunan ini terjadi karena penurunan kondisi perekonomian yang disebabkan antara lain tutupnya beberapa industri besar di Kabupaten Aceh Utara dan meningkatnya angka pengangguran. Sementara untuk intensitas permintaan kredit relatif normal termasuk juga permintaan kredit produktif. Pihak Bank BNI sangat mendukung rencana pemerintah daerah melakukan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh karena akan meningkatkan perekonomian dan juga transaksi perbankan. Bank BNI juga melihat peluang ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh cukup terbuka sehingga eksportir akan memudahkan kegiatan ekspor hasil pertanian dan pupuk.

Bank BNI juga menyatakan sangat siap untuk mendukung kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh karena sebagai salah satu bank devisa, Bank BNI selama ini telah menjadi salah satu bank yang melayani ekspor-impor dan juga mengeluarkan LC. Dengan terjadinya ekspor impor maka dengan sendirinya eksportir akan membutuhkan fasilitas LC, apalagi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan bahwa setiap transaksi ekspor impor di atas US\$ 1 juta dolar disyaratkan untuk melakukan transaksi dengan LC. Bank BNI juga tidak menyatakan akan memberi kemudahan kepada eksportir untuk pengurusan kredit, karena dalam pemberian kredit tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian. Terakhir, Bank BNI menilai pembukaan Pelabuhan Krueng Geukueh saat ini fisibel karena para eksportir lokal yang selama ini melakukan transaksi ekspor melalui Pelabuhan Belawan dapat memanfaatkan Pelabuhan Krueng Geukueh sehingga dapat menghemat biaya transportasi.

Bank terakhir yang dimintai keterangan dalam mengungkap kesiapan perbankan dalam mendukung ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Lhokseumawe. Pada Bank Mandiri intensitas transaksi keuangan mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan sebagai dampak dari penurunan transaksi keuangan dari perusahaan vital seperti PT Arun, Exxon Mobil, Inc, dan lain-lain. Selain itu juga penurunan karena sektor riil yang belum berjalan dengan baik. Intensitas permintaan kredit pada Bank Mandiri juga mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan daya beli masyarakat sehingga masyarakat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer. Bank Mandiri mendukung rencana pemerintah daerah untuk membuka Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai pusat ekspor komoditi unggulan dari Aceh.

Pihak Bank Mandiri melihat untuk saat ini komoditi yang paling berpeluang untuk diekspor adalah pinang, namun demikian apabila dapat dikelola dengan baik maka komoditi-komoditi lain juga akan berpeluang untuk menjadi komoditi unggulan berbasis ekspor. Sebagai salah satu bank umum devisa Bank Mandiri bersama Bank BNI dan Bank BRI menyatakan sangat siap untuk mendukung kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, bahkan selama ini Bank Mandiri telah mengeluarkan LC untuk PT Arun NGL, sehingga pihak Bank Mandiri menyatakan sangat siap untuk mengeluarkan LC kepada eksportir yang membutuhkan selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada Bank Mandiri.

Dukungan KADIN

Secara umum Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) sangat mendukung rencana pengoperasian Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara sebagai pelabuhan ekspor-impor komoditi unggulan daerah. Karena sudah sangat representatif, hanya saja bagaimana upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk meyakinkan

eksportir melakukan transaksi ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh. Dalam mendukung upaya ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang dapat meningkatkan minat eksportir menggunakan Pelabuhan Krueng Geukueh.

Selama ini Kadinda bersama pemerintah daerah telah mencari peluang ekspor pada negara-negara yang dapat dijadikan sebagai tujuan ekspor terutama setelah adanya IMT-GT dan AFTA. Kadinda menilai sudah saatnya komoditi unggulan yang dihasilkan Aceh dapat diekspor melalui pelabuhan sendiri yaitu Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara. Pihak Kadinda menilai kondisi ekonomi pada saat konflik relatif parah, dan mengalami pertumbuhan yang buruk akibat dari terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam mencari kerja dan berusaha.

Beberapa komoditi yang layak dan dikategorikan unggulan untuk diekspor menurut Kadinda antara lain; kelapa sawit, pinang, kakao, karet, kopi, dan beberapa hasil alam lainnya. Beberapa negara yang dapat dijadikan negara tujuan ekspor berdasarkan dari basis permintaan selama ini adalah; India dengan komoditi ekspor pinang, Jepang dengan komoditi ekspor kopi, karet dan udang windu.

Kesiapan Eksportir Daerah

Komponen terpenting dalam suatu proses ekspor tentu saja pelaku ekspor tanpa adanya kesediaan eksportir melakukan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, maka rencana pembukaan jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara akan menjadi tidak berarti. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 pengusaha ekspor komoditi daerah, menunjukkan bahwa para eksportir ini sangat mendukung rencana pembukaan jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara. Namun demikian para eksportir ini menyatakan bahwa dalam proses pengalihan ekspor dari Pelabuhan Belawan - Sumatera Utara ke Pelabuhan Krueng Geukueh akan membutuhkan waktu dan proses. Hal ini lebih disebabkan masalah sarana dan prasarana, administrasi perusahaan, dan kerjasama perdagangan dengan mitra dagang dari luar negeri.

Sekitar 68,4% eksportir menyatakan kesiapannya untuk mengalihkan rute ekspornya dengan alasan untuk penghematan biaya-biaya. Selama ini dengan melakukan ekspor dari Pelabuhan Belawan - Sumatera Utara membutuhkan biaya transportasi dan biaya penggudangan lebih besar. Rata-rata eksportir menghadapi tiga jalur distribusi komoditi yang akan diekspor. Setiap perusahaan memiliki sub pengumpul barang di masing-masing daerah, kemudian barang dikumpulkan di gudang perusahaan di Medan, baru kemudian diangkut ke Pelabuhan Belawan. Rata-rata butuh waktu tiga hari penggudangan di pelabuhan untuk memuat dalam peti kemas, baru terealisasi pengangkutan barang ke negara tujuan. Dengan kondisi yang demikian tentu kurang menguntungkan bagi pengusaha, jalur distribusi yang panjang akan berdampak pada peningkatan *cost* dan beban perusahaan, selain itu dengan waktu yang relatif lama membuat kesulitan bagi eksportir untuk mengekspor komoditi-komoditi yang tidak tahan lama (*undurable goods*). Padahal kebutuhan negara-negara importir tidak hanya terbatas pada komoditi-komoditi yang tahan lama saja, tetapi juga komoditi yang tidak tahan lama, seperti Jepang dan Korea merupakan negara pengimpor udang dan ikan terbesar.

Dengan dibukanya jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh para eksportir berharap dapat melakukan transaksi dengan waktu yang lebih singkat sehingga hasil-hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan yang selama ini sulit untuk diekspor akan dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan yang dapat diekspor. Udang windu, ikan kakap, ikan bawal, dan cumi-cumi adalah beberapa contoh komoditi yang mempunyai permintaan tinggi di luar negeri, tetapi sulit untuk diekspor

dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas. Hal ini tentu saja sangat ironis mengingat Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai sumber kekayaan cukup melimpah dari sektor perikanan, karena sepanjang garis pantai Aceh berbatasan langsung dengan lautan.

Para pengusaha mengharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan suatu sistem administrasi yang mempermudah bagi para pengusaha untuk melakukan transaksi ekspor-impor. Apalagi pemerintah dapat membuat regulasi dengan berlindung di bawah payung hukum kepabeanaan seperti:

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan,
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya,
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 202/BC/2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Ekspor dan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

Kesiapan Pelabuhan

Secara umum pihak PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe, Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara sangat siap untuk melakukan transaksi ekspor-impor. Hal ini dikarenakan pelabuhan tersebut dalam katagori berskala internasional dan juga sudah sering disinggahi kapal-kapal besar. Selama ini Pelabuhan Krueng Geukueh digunakan sebagai pelabuhan untuk mengangkut material seperti semen, beras, dan juga migas. Di Pelabuhan Krueng Geukueh telah tersedia sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana terdapat pada pelabuhan lain seperti; gudang, *forklift*, *crane* dan sebagainya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Asisten Manager Pelayanan Kapal dan Barang PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe sebagai berikut:

- Pada saat ini Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara sangat berpeluang untuk melakukan transaksi ekspor impor disebabkan pada masa konflik kondisi ekonomi sangat tidak berkembang (stagnan) bahkan cenderung menurun secara perlahan-lahan. Berbeda dengan kondisi sekarang yang semakin kondusif, aktivitas usaha terutama di sektor pertanian, perikanan, jasa maupun industri dapat dijalankan dengan maksimal. Kondisi ini menjadikan produksi komoditi unggulan yang berbasis ekspor juga semakin meningkat. Beberapa komoditi unggulan yang memungkinkan untuk diekspor antara lain; pinang, kakao, kelapa sawit, minyak kelapa. Dari sektor perikanan juga terdapat beberapa komoditi unggulan seperti; udang windu, ikan air tawar dan ikan air asin yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Dari sektor pertambangan dan industri terdapat komoditi seperti; pupuk, amonia, sulfur, dan tentu saja migas.
- Pihak pelabuhan juga melihat bahwa komoditi-komoditi yang berasal dari Aceh mempunyai prospek yang cukup bagus di pasar internasional. Selain memiliki kekhasan, dan dengan kondisi riil yang ada saat ini diyakini mempunyai pasokan yang cukup untuk diekspor dalam waktu yang berkelanjutan. Beberapa negara yang mempunyai peluang besar menjadi negara tujuan ekspor; Malaysia, Singapura, India, China, Korea, Jepang, Amerika, maupun Eropa.

Tantangan Ekspor Melalui Pelabuhan Krueng Geukuh

Pengusaha yang bergerak dalam bidang ekspor-impor di Aceh jumlahnya masih sedikit. Sebagian besar hanya sebagai bentuk pengumpul komoditi daerah yang kemudian diangkut ke Medan-Sumatera Utara. Walaupun para eksportir yang di Medan juga merupakan warga Aceh, namun mereka telah menetap di Medan dan perusahaan juga dibangun dan dikembangkan di Medan, karenanya akan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah daerah untuk meyakinkan para eksportir ini melakukan transaksi bisnis melalui Pelabuhan Krueng Geukueh. Tanpa adanya komitmen yang kuat dan dukungan regulasi yang jelas akan sangat sulit untuk membuat geliat ekspor-impor berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tantangan lain berupa kesiapan teknis dan sumberdaya manusia. Kesiapan teknis berupa kesiapan sarana dan prasarana; jalan, gudang dan fasilitas bongkar muat di pelabuhan. Kesiapan sumberdaya manusia menyangkut sumber daya yang dimiliki dari setiap komponen yang terlibat dalam proses ekspor-impor. Tanpa adanya persiapan yang memadai dalam menyongsong perdagangan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh akan sangat menyulitkan bagi mitra dagang untuk masuk ke Aceh, dan tentunya tantangan ini akan menjadi hambatan untuk terlaksananya rencana ekspor-impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara. Sebaliknya apabila kesiapan teknis dan sumberdaya manusia mampu dimaksimalkan maka tantangan ini akan menjadi peluang dan kesempatan.

Faktor keamanan juga perlu diperhatikan dengan seksama karena sebagaimana diketahui Aceh sebagai salah satu daerah yang mengalami konflik bersenjata dalam jangka waktu yang relatif lama. Walaupun sudah kondusif pasca perjanjian damai antara pihak yang bertikai, namun perlu diwaspadai tingkat kerentanan gangguan keamanan masih memungkinkan yang timbul sebagai dampak kesenjangan sosial, maupun ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Pihak-pihak yang selama konflik merasa terlibat dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat tidak semuanya menikmati hasil yang merata pasca damai. Pihak-pihak inilah yang dikhawatirkan akan mengganggu proses damai yang sedang berlangsung di Aceh. Apabila pemerintah daerah mampu meminimalisir dan mengantisipasi kerawanan ini, maka tantangan ini menjadi peluang, sebaliknya apabila pemerintah daerah tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan kerawanan ini maka akan menjadi hambatan bagi terlaksananya ekspor-impor di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara.

Hambatan Ekspor Melalui Pelabuhan Krueng Geukuh

Hambatan dalam pembukaan jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara relatif lebih sedikit dibandingkan dengan peluang yang akan didapat. Beberapa hambatan akan muncul apabila setiap tantangan yang ada tidak mampu dimaksimalkan menjadi peluang. Secara garis besar hambatan yang akan dihadapi dapat dikelompokkan dalam empat hal; *Pertama*, kesiapan sumberdaya alam, dalam hal ini dapat dipahami bahwa umumnya komoditi-komoditi yang selama ini diekspor masih berbasis pada sektor primer (pertanian, perkebunan, dan perikanan) sehingga dikhawatirkan hasil pertanian yang dijadikan sebagai komoditi ekspor tidak mampu memenuhi kebutuhan tonase kapal untuk diekspor secara kontinyu. Apabila hal ini terjadi maka para pelaku ekspor akan kesulitan untuk melakukan transaksi dagang di Aceh. *Kedua*, kesiapan sumberdaya manusia yang masih terbatas, walaupun pihak PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe telah berpengalaman melakukan pelayanan transaksi ekspor (terutama migas) lebih 20 tahun, namun masih diragukan kesiapan sumberdaya manusia baik dari komponen pelabuhan, maupun dari komponen lain yang terlibat dalam proses ekspor-impor seperti; pemerintah

daerah, pihak bea cukai, pihak keamanan, maupun dari masyarakat. *Ketiga*, berhubungan dengan sarana dan prasarana, sarana transportasi, jalan, jembatan, maupun pasar untuk menampung barang-barang masuk dari impor. *Keempat*, menyangkut masalah regulasi, pemerintah daerah harus mampu merumuskan suatu regulasi yang jelas dan menguntungkan pihak importir maupun eksportir agar memiliki daya tarik bagi para pelaku ekspor melakukan transaksi perdagangan melalui pelabuhan Krueng Geukuh, meminimalisir hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi barang-barang dari luar negeri, pemerintah daerah juga harus mampu menjamin keamanan bagi pelaku usaha ekspor-impor ini. Keempat hambatan yang dikemukakan di atas semuanya berasal dari tantangan, yang apabila mampu dikelola dengan baik akan menjadi peluang. Sebaliknya apabila tidak mampu dipenuhi akan menjadi hambatan dalam pembukaan Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai jalur perdagangan internasional.

Kesimpulan

1. Komoditi unggulan ekspor Aceh masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, perkebunan, dan perikanan). Intensitas ekspor yang tinggi masih dipegang oleh komoditi seperti; kelapa sawit (termasuk CPO dan produk turunannya, karet, pinang, kopi, kakao). Dari sektor perikanan seperti; udang windu, kakap putih, kakap hitam, dan bawal intensitas ekspor masih relatif rendah. Demikian juga dari sektor pertambangan (selain migas), Aceh juga mengeksport sulfur dan ammonia tetapi intensitasnya masih sangat rendah.
2. Negara-negara yang cukup potensial untuk tujuan ekspor yang paling utama tentu saja Malaysia. Permintaan pasar di Malaysia untuk produk-produk dari Aceh sangat tinggi dan tidak spesifik, artinya semua produk dapat diekspor ke Malaysia. Bahkan untuk komoditi-komoditi yang selama ini tidak katagorikan sebagai komoditi berbasis ekspor seperti kelapa, ikan, maupun produk kerajinan. Negara lain yang dapat dijadikan sebagai tujuan ekspor adalah Singapura, India, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa.
3. Potensi kerugian ekonomis bagi daerah sebagai akibat dari transaksi ekspor komoditi unggulan ekspor yang selama ini dilakukan melalui Pelabuhan Belawan Sumatera Utara sangat besar mencapai Rp14,435 milyar per tahun. Kerugian ekonomis ini diperhitungkan berasal dari bea cukai, kesempatan penerimaan PAD dari kegiatan transaksi ekspor impor sekitar Rp2,61 milyar per tahun. Penyerapan tenaga kerja, biaya bongkar muat sekitar Rp6 milyar per tahun, penerimaan pelabuhan termasuk biaya penggudangan barang berkisar antara Rp1,2 – Rp1,8 milyar per tahun, penghematan biaya transportasi diperkirakan antara Rp2,4 – Rp2,8 milyar per tahun, dan pendapatan masyarakat di sekitar pelabuhan, dan biaya-biaya sosial ekonomi lain yang diperhitungkan diperkirakan sekitar Rp650 – Rp800 juta per tahun.
4. Peluang pembukaan jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara pada saat ini cukup besar, karena adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah, eksportir, asosiasi pengusaha (Kadin), dari perbankan, maupun dari pihak PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe. Namun demikian dalam merealisasikan rencana pembukaan jalur ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara juga akan menghadapi hambatan-hambatan yang berasal dari tantangan yang tidak mampu dimaksimalkan menjadi peluang.

Rekomendasi

1. Pemerintah daerah khususnya Pemda Kabupaten Aceh Utara harus mampu membuat suatu regulasi yang menguntungkan bagi pelaku ekspor-impor sebagai daya tarik bagi pelaku bisnis melakukan transaksi perdagangan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh.
2. Pihak perbankan sangat dibutuhkan peran serta dan dukungan finansial untuk memperlancar kegiatan ekspor-impor. Pemberian kemudahan dan fasilitas kredit yang lebih besar pada bidang ekspor-impor sangat dibutuhkan untuk mempercepat akselerasi perekonomian masyarakat. Fasilitas kredit tidak hanya untuk pelaku ekspor saja, tetapi juga bagi masyarakat dan pengusaha daerah penghasil komoditi unggulan berbasis ekspor. Tentu saja dalam membuat kebijakan kredit dimaksud pihak perbankan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peran asosiasi pengusaha (dalam hal ini Kadin) dibutuhkan untuk mencarikan mitra dagang, melakukan kerjasama dan kontak bisnis dengan negara asing, dan mencari peluang masuk bagi komoditi-komoditi unggulan daerah ke pasar internasional.
4. Diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pelaku ekspor untuk mengalihkan transaksi bisnisnya dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara ke Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara, selain itu juga diperlukan sosialisasi dan pelatihan tentang prosedur-prosedur dalam perdagangan internasional.
5. Masyarakat di sekitar Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara diharapkan mendukung pembukaan jalur ekspor impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh karena akan memberikan *multiplier effect* yang cukup besar bagi masyarakat dalam hal penyerapan tenaga kerja, maupun harga-harga komoditi yang lebih baik.